



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
(BASARNAS), DAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU)**

Tahun Sidang : 2020 – 2021
Masa Sidang : I
Rapat : Ke - 10
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal : Senin, 7 September 2020
Sifat : Terbuka
Pukul : 14.20 WIB s.d 17.40 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara
Acara : Membahas Alokasi Anggaran menurut fungsi dan program Anggaran TA 2021 Unit Eselon I Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2021.

Ketua Rapat : Hj. Nurhayati
Sekretaris : Nanik Sulityawati, S.A.P
Hadir Anggota : Fisik 19 Orang dan Virtual 21 Orang (40 Orang) dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Sekjen dan pejabat Eselon I Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Sekjen; Irjen; Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi; Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan; Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal; Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu; Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi;) beserta jajarannya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 14.20 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen dan para Pejabat Eselon I Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada hari ini adalah Membahas Alokasi Anggaran menurut fungsi dan program Anggaran TA 2021 Unit Eselon I Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2021.
3. Ketua Rapat mempersilakan Sekretaris Jenderal dan para Pejabat Eselon I Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

- Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Sekjen; Irjen; Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi; Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan; Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal; Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu; Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; dan Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing unit kerja eselon I Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Dalam ribuan rupiah

| NO | KEMENTERIAN/ UNIT KERJA | PAGU KEBUTUHAN TA 2021 | PENYESUAIAN NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2021 | SELISIH |
|----|---|------------------------------|---|--------------------|
| | | A | B | A-B |
| | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 4.108.894.870 | 3.689.809.142 | 419.085.728 |
| a. | Sekretariat Jenderal | 236.313.363 | 213.500.000 | 22.813.363 |
| b. | Inspektorat Jenderal | 56.221.873 | 50.000.000 | 6.221.873 |
| c. | Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi | 302.140.694 | 291.233.571 | 10.907.123 |
| d. | Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2.280.066.461 | 2.161.952.880 | 118.113.581 |
| e. | Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan | 166.130.532 | 93.335.600 | 72.794.932 |
| f. | Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal | 170.045.786 | 125.509.293 | 44.536.493 |
| g. | Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu | 158.247.130 | 87.916.994 | 70.330.136 |
| h. | Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi | 393.240.736 | 339.627.160 | 53.613.576 |
| i. | Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 346.488.295 | 326.733.644 | 19.754.651 |

Selanjutnya, Komisi V DPR RI akan memperjuangkan peningkatan anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sesuai dengan mekanisme dan proses pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

2. Komisi V DPR RI dan Setjen; Itjen; Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi; Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan; Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal; Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu; Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; dan Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sepakat bahwa program dan kegiatan masing-masing Unit Kerja Eselon I Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada Tahun Anggaran 2021 antara lain diprioritaskan dari hasil kunjungan kerja dan masukan serta usulan Komisi V DPR RI dalam rangkaian rapat RAPBN TA 2021.
3. Komisi V DPR RI meminta Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk menyempurnakan paparan dan rincian program sesuai dengan hasil Rapat Dengar Pendapat pada hari ini

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.40 .WIB.

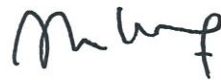
Jakarta, 7 September 2020

PLT. SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DESA PDTT



TAUFIK MADJID

KETUA RAPAT,



NURHAYATI